



Judul : Ancaman krisis pangan: diversifikasi bukan opsi, tapi kebutuhan
Tanggal : Senin, 24 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Ancaman Krisis Pangan Diversifikasi Bukan Opsis, Tapi Kebutuhan

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo mendorong Pemerintah melakukan diversifikasi pangan. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam hal tersebut.

Firman menjelaskan, dalam pembahasan revisi UU Pangan, ada tiga hal yang jadi catatan penting. Yakni, diversifikasi pangan, inovasi berbasis kearifan lokal, serta pengendalian alih fungsi lahan. Revisi UU ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks.

"Catatan penting kami adalah agar pemerintah melakukan diversifikasi pangan," jelas Firman dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Selanjutnya, setelah diversifikasi, lakukan inovasi pada pangan-pangan berbasis kearifan lokal. Hal tersebut agar ketergantungan pada beras bisa dikurangi, karena pada dasarnya Indonesia memiliki potensi komoditas pangan yang luas, mulai dari jagung, ubi, sagu, hingga hasil perikanan.

"Untuk itu, perlu pendekatan klasterisasi pangan, agar setiap daerah dapat memproduksi komoditas unggulannya secara terarah dan tidak tumpang tindih," terangnya.

Klasterisasi, lanjutnya, jadi hal krusial karena pangan tidak hanya beras. Ada jagung, ubi, sagu, dan ikan. Harus ada pemetaan agar tidak overlapping, sehingga ke depan, produksi bisa terukur dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan kualitas terjaga.

Menurutnya, pemaksaan penanaman komoditas tertentu tanpa menyesuaikan kondisi wilayah justru kontraproduktif. Jangan sampai wilayah

yang tidak produktif untuk padi malah dipaksakan menanam tanaman tersebut. "Kita harus gunakan tanaman sesuai potensi lokal seperti sagu, jagung, atau ubi," tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar isu alih fungsi lahan bisa ditangani dengan maksimal agar tidak jadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Sejumlah kasus alih fungsi lahan di berbagai daerah kudu jadi alarm bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. "Alih fungsi lahan ini harus dikendalikan agar target swasembada pangan bisa tercapai," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri juga menyoroti lemahnya diversifikasi pangan Indonesia. Sampai saat ini, negara hanya memanfaatkan sekitar 25 spesies pangan, jauh tertinggal dibanding China yang telah mengonsumsi lebih dari 125 spesies.

"Kondisi ini merupakan ironi besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia," ucap Rokhmin.

Dia menjelaskan, diversifikasi pangan merupakan salah satu pilar utama kemandirian dan ketahanan pangan. Ketergantungan pada hanya tiga komoditas besar seperti padi, jagung, dan kedelai, membuat Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga global, dan gangguan distribusi.

Karena itu, revisi UU Pangan harus memberi perhatian khusus terhadap perluasan konsumsi pangan lokal. Mulai dari sorgum, sagu, umbi-umbian, talas, kacang-kacangan, hingga pangan laut yang selama ini belum mendapatkan tempat strategis dalam kebijakan Pemerintah. ■ PVB